

Partai, *Civic Education* dan Wilayah "Netral Politik"

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

I

Melihat begitu banyaknya partai yang menjamur saat ini, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang memaksa untuk bersikap 'mencadangkan diri' (*reserve*) dan berjarak pada partai-partai itu. Hingga tingkat tertentu, sikap *reserve* itu bahkan memuncak menjadi semacam kejengkelan. Dalam debat partai-partai yang diselenggarakan oleh sejumlah televisi swasta, saya juga mencium hal yang sama pada publik yang biasanya menjadi obyek kampanye partai-partai itu, ialah perasaan "kurang senang" dan keengganan, suatu *political reluctance*. Pada lapisan anak-anak muda yang melihat masa depan politik Indonesia dari kacamata yang romantis dan idealistis, keengganan itu lebih jelas lagi. Bahkan dalam salah satu kesempatan debat partai itu, terlihat ada semacam sinisme yang mencibir partai-partai sebagai sesuatu yang hanya membuat keadaan yang *insecure* (tak aman) sekarang ini menjadi kian rusuh dan tidak jelas.

Sebetulnya keengganan itu, dari pelbagai seginya,

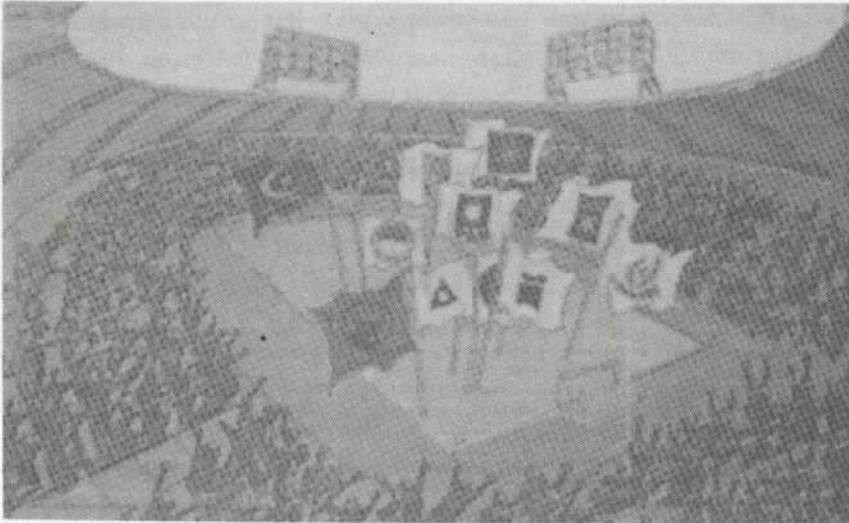


Penulis adalah Pemimpin Redaksi Tashwirul Afkar

bisa dipahami. Pertama-tama, partai-partai yang sekarang ini bermunculan itu belum membuktikan suatu *record* politik yang dapat dijadikan suatu garansi dukungan suatu konstituen. Hal ini jelaslah amat wajar, sebab kondisi terbuka seperti yang kita lihat saat ini merupakan pengalaman baru. Semua orang melakukan "eksperimen politik", dalam istilah Cak Nur. Tidak ada suatu garansi politik bahwa eksperimen itu akan menghasilkan masa depan yang diidealkan banyak

orang. Jika ada dukungan yang luas buat partai tertentu, seperti PDI Perjuangan dan PKB, maka watak dukungan itu sudah jelas sifatnya *irrational*. Dalam kasus PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati, misalnya, dukungan massa yang (diduga) begitu besar buat partai ini lebih banyak dilatari oleh motif *atavisme* atau solidaritas. *Atavisme*, karena ada kecenderungan yang begitu kuat pada masa PDI perjuangan untuk kembali kepada semacam warisan "leluhur" yang agak misterius, ialah warisan ajaran Bung Karno. *Solidaritas*, karena sepanjang periode akhir rejim Soeharto, PDI Mega memperoleh tekanan

Sumber: Detak



yang berat, begitu rupa sehingga memungkinkan partai ini menjadi semacam ikon kolektif bagi "korban" rejim Orba yang menumpuk sepanjang 32 tahun. Dukungan massif buat partai ini sepertinya mempermukulkan bahwa *rakyat berada di pihak korban*. Dukungan yang (juga diduga) begitu luas buat PKB juga kurang lebih sama sifatnya: irrasional. Di satu pihak, karisma Gus Dur yang begitu besar jelas mempunyai pengaruh yang tidak main-main dalam mengarahkan *voters behavior* warga nahdliyyin. Di pihak lain, dukungan itu juga bisa dianggap kelanjutan saja dari *primordial loyalty* (kesetiaan rumpun) warga nahdliyyih terhadap NU sebagai jam'iyah.

Keengganan itu juga diperdalam lagi oleh kenyataan bahwa partai-partai yang ada saat ini didirikan bukan atas dasar suatu 'ideologi' yang sifatnya *clear-cut*: jelas dan bisa membedakan dari partai-partai lain. Memang, hampir mustahil mengharapakan suatu partai saat ini berdiri dengan basis ideologi yang jelas, setelah sekian lama 'ideologi' sebagai basis agregasi politik dihancurkan dasar-dasarnya oleh pemerintah Orde Baru. Apakah yang membedakan antara PDI Perjuangannya Mega dari PNI-nya Ibu Supeni; PKB dari PKU-nya Yusuf Hasyim; PBB dari PPP-nya Hamzah Haz; Partai Keadilan dari Partai Umat Islamnya Dr. Deliar Noer; PAN dari PKB-nya Matori, untuk menyebut beberapa contoh saja. Hal-

hal ini memaksa publik memandangi partai-partai sebagai suatu agregasi politik yang hanya ditandai oleh "bendera". Setelah sekian lama ideologi dihancurkan, yang muncul bukanlah suatu tindakan politik yang rasional seperti yang diharapkan oleh para pendiri awal Golkar dahulu, ialah suatu kesetiaan politik yang lebih rasional karena pertimbangan program (dahulu, di tahun 70-an, istilah *program oriented* begitu populer). Yang muncul justru kesetiaan (*loyalty*) baru yang juga sama irrasionalnya, ialah *flag-based loyalty*, suatu kesetiaan

berdasarkan bendera. Kesetiaan yang irrasional semacam ini, di ujungnya, mengandung kecenderungan besar buat terjadinya pelimpahan 'cek kosong' bagi partai tertentu untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendaki para elitnya. Jika kesetiaan pada suatu partai tidak dilandasi dengan pengertian yang mendalam mengenai isi perjuangan partai yang bersangkutan, maka kemungkinan terjadinya eksploitasi suara publik dalam pemilu buat menjustifikasi kepentingan pribadi salah satu elit partai bersangkutan sudah tinggal selangkah lagi. Apalagi jika *public accountability* (pertanggung jawaban publik) partai-partai rendah mutunya. Belumlah lagi mempertimbangkan bahwa tingkat pendidikan publik di pedesaan yang masih rendah, sehingga amat mustahil mengandaikan suatu kesetiaan rasional sepenuhnya dalam keadaan yang sedemikian itu.

Sumber kedua keengganan publik pada partai-partai saat ini adalah adanya apa yang seringkali disebut sebagai "euforia politik", suatu kegembiraan yang kelewat batas karena bedahnya bendungan lama yang dahulu mengungkung publik merealisasikan suatu *civil liberty*. Kebebasan yang baru saja dinikmati itu ditanggapi dengan pelbagai cara oleh publik; ada tanggapan yang sifatnya bertanggungjawab (*responsible freedom*), ada pula tanggapan yang sama sekali tidak bertanggungjawab (*irresponsible freedom*). Meskipun tidak ada suatu batasan yang tegas antara

kedua hal itu, serta keniscayaan upaya yang persisten untuk terus memperluas batasan-batasan yang masuk akal bagi konsep "kebebasan" dalam konteks politik Indonesia (karena kebebasan jelas berwatak *value laden*, sarat nilai), namun setiap tindakan politik yang justru mengarah kepada timbulnya fragmentasi sosial, jelas tidak bisa dianggap sebagai tanggapan yang bertanggungjawab dalam memanfaatkan suatu situasi yang terbuka. Mengobarkan sentimen agama dan etnisitas sebagai alat untuk memperoleh dukungan massa dalam keadaan semacam itu jelas merupakan sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Kata "bertanggungjawab" di sini, dengan segala permohonan maaf, janganlah dikait-kaitkan lagi dengan makna yang dahulu dipaksakan oleh rejim Orde Baru atas istilah itu.

Euforia itu membuat masyarakat menghadapi keadaan yang serba membingungkan. Pada saat semua orang merasa berwenang (*authoritative*) untuk melakukan tindakan-tindakan politik, lepas dari motif apa yang melatarinya, masyarakat justru berhadapan dengan keadaan di mana suatu *publicly trusted authority* (suatu otoritas yang dipercaya publik luas) kian sulit ditemukan. Orang akan bisa mengatakan, bahwa justru dengan absennya otoritas yang menjadi rujukan "tunggal" itu, keadaan justru mendekati situasi ideal: ialah kompetisi yang demokratis antara otoritas-otoritas kecil yang seimbang untuk mempengaruhi pengaruh. Tumpuan dengan demikian bukan dilandaskan pada Otoritas tunggal dengan "O" kapital, tapi pada suatu mekanisme sistemik yang reguler sebagai hasil negosiasi antara otoritas-otoritas kecil itu. Tetapi, jelas, yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah, atau lebih tepatnya belum, mengarah ke situasi ideal itu. Dengan kata lain, situasinya bukan mengarah kepada suatu 'kristalisasi' yang akan memberikan arah buat publik, tetapi justru kepada "de-kristalisasi"; bukan pada pembentukan suatu kesepakatan-kesepakatan umum yang *genuine*, tetapi kepada fragmentasi yang kian membingungkan masyarakat. Jika keadaan "tak berpeta" ini terus bertahan dalam jangka yang lama; atau tepatnya, jika transisi politik ini tidak bisa dilampaui dengan terciptanya 'peta',

'kristal' dan kesepakatan baru, maka fragmentasi politik akan kawin dengan fragmentasi sosial, sehingga berakibat pecahnya struktur-struktur yang sekarang ini sudah ada. Nampanya, euforia politik merupakan hambatan yang amat besar untuk mengarahkan keadaan "tak berpeta" itu menuju keseimbangan baru. Dalam keadaan semacam inilah, sinisme publik mulai muncul terhadap partai-partai yang ada.

II

Mungkin, dalam keadaan yang serba membingungkan ini, di mana setiap orang seperti dipaksa untuk mengambil tindakan-tindakan yang berjangka pendek, di mana pragmatisme merajalela di segala bidang, ada baiknya suatu pikiran untuk merevitalisasi suatu wilayah yang 'netral' politik dihidupkan kembali. Gagasan Gus Dur dahulu mengenai suatu bentuk "unpolitical politic", suatu politik yang tidak berpolitik, pantas untuk diangkat kembali sebagai bahan perbincangan. Pertimbangan pokok yang ingin dikemukakan di sini adalah kenyataan bahwa hampir mustahil mengandalkan suatu proses demokratisasi hanya pada lembaga-lembaga formal yang selama ini dianggap mewakili cita tentang demokrasi, seperti parlemen, partai-partai dan lembaga peradilan. Dengan kata lain, prosedur-prosedur demokrasi yang formal boleh jadi hanya mewakili suatu kenyataan di permukaan yang belum tentu meresap hingga ke struktur kesadaran kolektif dan keinsafan masyarakat yang paling dalam. Bagaimana menjamin suatu ketaatan atas etika *fair-play* (permainan yang jujur) dalam penyelenggaraan kekuasaan dan dalam kehidupan kepartaian jika hanya bertopang pada aturan-aturan formal yang dibuat oleh parlemen. Proses-proses demokratisasi harus disokong pula oleh suatu "struktur mental" yang sifatnya *latent* (tersembunyi), tidak *manifest* (nyata). Dengan kata lain, dibutuhkan suatu *civic culture*¹, kebudayaan sipil, yang ditumbuhkan melalui *civic education*, pendidikan sipil, dengan disokong oleh pengalaman praksis nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemahaman saya, jika dahulu Gus Dur dengan amat bersemangat berbicara mengenai suatu *unpolitical politic*, maka itu berarti membangun suatu infrastruktur politik yang latent sifatnya untuk menyangga suatu prosedur demokrasi yang formal. Wilayah yang "latent" itu kemudian baru belakangan mendapatkan nama, ketika orang ramai berbicara mengenai *civil society*, suatu istilah yang kemudian dengan agak "mereduksi" dialihkan menjadi "masyarakat madani". Sektor kehidupan masyarakat di mana proses 'sivilisasi' atau pendidikan untuk *civic culture* itu berlangsung adalah apa yang dalam tradisi filsafat Jerman disebut sebagai *lebenswelt*, dunia kehidupan sehari-hari. Wilayah inilah yang dahulu, oleh Gus Dur, digambarkan bisa dijadikan semacam tempat memupuk kultur sipil dengan NU sebagai eksemplar utama. Gagasan ini nampaknya kian relevan untuk dihidupkan kembali saat ini, di mana publik dibuat sadar bahwa ternyata apa yang dilihatnya sebagai 'stabilitas politik' selama rejim Orde Baru dahulu, bukanlah hasil dari suatu perkawinan yang genuine antara prosedur-prosedur formal demokratisasi yang pada saat itu "seolah-olah"² telah ada dan kultur sipil sebagai insfrastruktur yang menyangganya. Stabilitas itu dicapai justru melalui "perkawinan haram" antara pembangunan ekonomi dengan penggunaan kekerasan. Akibatnya, stabilitas yang tercipta dari sana menyimpan di baliknya banyak persoalan yang siap meledak setiap saat. Ketika "tenda politik" (political canopy) yang menyungkup semua permasalahan itu bolong, maka pecahlah seluruh struktur sosial yang selama ini dibangun dengan susah payah. Apa yang oleh mantan Menteri Agama, Tarmizi Taher, disebut sebagai middle path atau jalan tengah sebagai model kerukunan antar agama yang khas Indonesia, ternyata begitu rapuh setelah berhadapan dengan runtuhnya orde sosial yang ditandai oleh meletusnya pelbagai kerusuhan di mana-mana. Pendidikan politik, atau lebih tepatnya sivilisasi, yang dahulu dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Penataran P4, ternyata hanya menghasilkan struktur mental yang palsu dan rapuh, karena dilaksanakan melalui pemaksaan oleh

(meminjam istilah Louis Althusser) aparatus ideologi.

Apa yang saya sebut sebagai "wilayah yang netral politik" dalam judul karangan ini adalah mencerminkan apa yang disebut *lebenswelt* di atas. Dalam wilayah inilah masyarakat mengalami suatu 'latihan', *exercise*, yang empiris dalam membentuk kultur sipil yang bebas dari pengaruh dua kekuatan besar sekaligus: pengaruh negara di satu pihak, dan pasar di pihak lain. Inilah "sektor antara" atau *cultural intermediary* yang memperkuat prosedur-prosedur formal demokrasi di tingkat permukaan. Sesungguhnya di sini tempat agama sebenarnya: sebagai suatu inspirasi moral; sebagai —dalam bahasa *ushulul fiqh*—*illat* atau *raison d'être* bagi politik; sebagai landasan buat memperkuat wilayah yang "dinetralkan dari politik" (baca: negara dan pasar)³. Munculnya partai-partai sekarang ini menyerupai sebuah pisau dengan dua mata: di satu sisi membuka kesempatan buat publik untuk mengalami sistem multi partai yang memungkinkan adanya negosiasi politik yang sungguhan (*genuine*), di lain pihak dapat membawa fragmentasi sosial karena belum adanya dukungan dari sektor "*cultural intermediary*" tersebut. Akibatnya, alih-alih merupakan cerminan dari ekspresi pluralitas, munculnya partai-partai tersebut justru merupakan simptom dari fragmentasi; bukan memperkuat kohesi sosial serta memberdayakan publik, tapi justru memperlemah dasar-dasar politik publik itu sendiri⁴. Kemunculan partai-partai itu, dengan demikian, kian meniscayakan upaya yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperkuat 'wilayah netral politik' tersebut. Sebab, tanpa upaya demikian, maka harapan yang digantungkan pada prosedur-prosedur formal demokrasi akan menguap tanpa wujud nyata.

Seorang penulis Cekoslowakia yang menjadi anggota penandatanganan Piagam 1977 yang amat terkenal itu, pernah berbicara tentang kultur paralel⁵, suatu kebudayaan yang diolah sendiri oleh publik dalam suatu *exercise* panjang dan menjadi semacam "pengimbang" yang paralel bagi kultur resmi, baik yang dibentuk melalui struktur negara atau pasar. Ide ini menekankan pentingnya aspek 'perimbangan', bukan dominasi atau subsumasi. Gagasan tentang

"perimbangan" ini penting, sebab pada tahun 1990-an awal, ketika diskusi tentang civil society dimulai di Indonesia, ada suatu reaksi keras atas konsep itu dengan alasan bahwa mempertentangkan antara sipil dan non-sipil (dalam kasus Indonesia adalah militer) adalah tidak masuk akal. Dikotomi antara sipil dan non-sipil, nampaknya, tidak bisa diterima dalam konteks politik dan kultural Indonesia. Sudah tentu, hal ini merupakan manifestasi saja dari ide tentang negara kesatuan, negara integralistik—untuk meminjam istilah Prof. Soepomo—di mana suatu negara digambarkan sebagai suatu gestalt (dalam pengertian psikolog Willem Wundt), suatu keseluruhan yang merupakan subsumasi dari unsur-unsurnya; di mana unsur-unsur tersebut tidak mempunyai eksistensi yang terpisah dan mandiri, tidak bisa diterangkan dan dipahami kecuali dalam konteks gestalt itu sendiri. Negara, dahulu dalam tradisi pemerintahan Orde Baru, ada suatu gestalt di mana warga negara memperoleh arti daripadanya. Negara juga merupakan subsumasi atau ringkasan abstraksi dari kehendak-kehendak pribadi yang lebih rendah nilainya. Walhasil, negara adalah superordinat yang mengatasi dan "menjelmakan" keinginan individu yang subordinatnya. Dalam konteks ide negara yang demikian itu, jelas kultur paralel bukan suatu tawaran yang dianggap baik. Ia justru merupakan unsur yang akan 'menggerogoti' negara itu sendiri. Karena warisan ide tentang negara kesatuan itu masih cukup kuat akar-akarnya dalam imajinasi kolektif publik, maka upaya untuk membangun kultur paralel itu menjadi kian niscaya. Kultur itu tak lain adalah bagian dari civic culture yang menyangga 'wilayah netral politik' di atas. Dengan cara itulah suatu sistem yang demokratis akan bertahan lebih lama. Tanpa itu, sekali lagi, kelahiran partai-partai saat ini serta impian yang

mengikutinya (yaitu terciptanya sistem yang demokratis) hanya akan melahirkan suatu sistem politik yang getas, fragile: mudah retak dan pecah setiap saat.

Catatan:

¹ Kultur sipil di sini dimaksudkan sebagai nilai, norma dan budaya yang menghormati beberapa aspek pokok dalam demokrasi, ialah (1) penghormatan atas hak-hak asasi (yang melingkupi baik hak-hak sipil/politik, hak-hak sosial ekonomi, dan hak-hak kultural), (2) penghormatan atas prinsip legalitas, (3) penghormatan atas individualitas, (4) penghormatan atas pluralitas. Di sini masih ada kontroversi: adakah aspek sekularisme bisa dijadikan sebagai salah aspek dalam kultur sipil. Dalam pengalaman sejarah Barat, sekularisme adalah bagian pokok dalam kultur sipil itu. Lihat catatan kaki no. 3 di bawah.

² Gus Dur di tahun 80-an pernah berbicara mengenai *demokrasi seolah-olah*. Seolah-olah ada praktek demokrasi di tingkat prosedur formal tapi sesungguhnya tidak ada karena tak disangga oleh kultur sipil di bawahnya.

³ Saya berpendapat bahwa konsep *sekularisasi* akan lebih tepat jika dipahami dalam kerangka penciptaan wilayah yang netral politik ini. Jadi bukan menetralkan wilayah publik dari pengaruh agama, seperti yang umum dipahami orang mengenai makna sekularisasi, tetapi menempatkan agama sebagai landasan kultural untuk memperkuat prosedur-prosedur formal dalam wilayah publik itu. Dengan kata lain, hubungan antara wilayah publik dan privat tidak dipahami sebagai dua ruang yang berhubungan secara langsung dan mekanistik, tetapi hubungan itu lebih bersifat 'tidak langsung' karena melalui mediasi 'struktur perantara'.

⁴ Ide ini saya pinjam dari Moeslim Abdurahman. Dalam sebuah percakapan pribadi, dia melontarkan suatu perbedaan yang bagi saya sangat baik antara heterogenitas yang tercakup dalam pengertian "pluralisme" dengan heterogenitas yang justru masuk kedalam kategori fragmentasi. Dua-duanya mengandung unsur keragaman, tetapi mempunyai implikasi yang berbeda: yang satu berdampak pada terciptanya kohesi sosial; sementara yang lain justru memperlemahnya.

⁵ Dalam bahasa kita, mungkin bisa diterjemahkan sebagai "kultur tandingan" atau *counter culture*.